

Laporan Kinerja

Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Ambon

2024



Menuju Masa Depan Terbaik
Tetap Optimis dan berIntegritas



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara (KPKNL) Ambon pada tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja KPKNL Ambon disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Ambon di tahun 2024 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, KPKNL Ambon memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Pelayanan Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum sebagian besar target kinerja KPKNL Ambon pada tahun anggaran 2024 dapat tercapai, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja KPKNL Ambon cukup berhasil. Keberhasilan KPKNL Ambon tergambar dalam kemampuan untuk memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan selama Tahun Anggaran 2024. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercapai/terlampau dengan capaian HIJAU sebanyak 19 IKU dan hanya 1 IKU dengan capaian KUNING.

Demikian Laporan Kinerja KPKNL Ambon tahun 2024 ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran yang dibebankan kepada KPKNL Ambon pada tahun anggaran 2024.

Ambon, 3 Februari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Ambon



Ditandatangani secara elektronik
Catur Setiono



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Disamping itu, LAKIN KPKNL Ambon 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Ambon sebagai upaya untuk mencapai visi, misi dan tujuan Kantor KPKNL Ambon.

Visi KPKNL Ambon adalah “Menjadi Kantor Pelayanan DJKN terdepan dalam mendukung visi DJKN Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Untuk mewujudkan visi tersebut KPKNL Ambon menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan Pengelolaan Kekayaan Negara.
2. Mengamankan Kekayaan Negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah Pengelolaan Kekayaan Negara.
4. Menghasilkan nilai Kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat

Untuk menunjang pencapaian visi dan misi tersebut, disusunlah Peta strategi KPKNL Ambon tahun 2024 berdasarkan metodologi *balanced score card* yang terdiri dari empat perspektif yaitu, *Stakeholder*, *Customer*, *internal process* dan *learning and growth*. Peta Strategi tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran Strategis. Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal;
4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien;

5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif
7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif;
9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel; dan
10. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah.

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja organisasi ditetapkanlah dulu ikhtisar mengenai rencana kegiatan satu tahun anggaran yang termuat dalam Kontrak Kinerja. Kontrak kinerja KPKNL Ambon tertuang dalam Kemenkeu *Three* KPKNL Ambon yang merupakan turunan dari Kemenkeu *Two* Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku. Secara umum pencapaian IKU KPKNL Ambon pada tahun 2024 sudah sesuai target yang ditetapkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,28%.

Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. sehingga mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi (*high performance organization*), adaptif serta tentunya tetap menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Daftar Isi

Kata Pengantar

Kata Pengantar	ii
----------------	----

Pendahuluan

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
Sumber Daya Manusia	4
Sarana dan Prasarana	6
Peran Strategis	7
Permasalahan	8
Upaya Pemecahan Masalah	9

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis	11
Penetapan Kinerja Tahun 2022	15
Pengukuran Kinerja	17

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi 2022	19
Realisasi Anggaran	24

Penutup

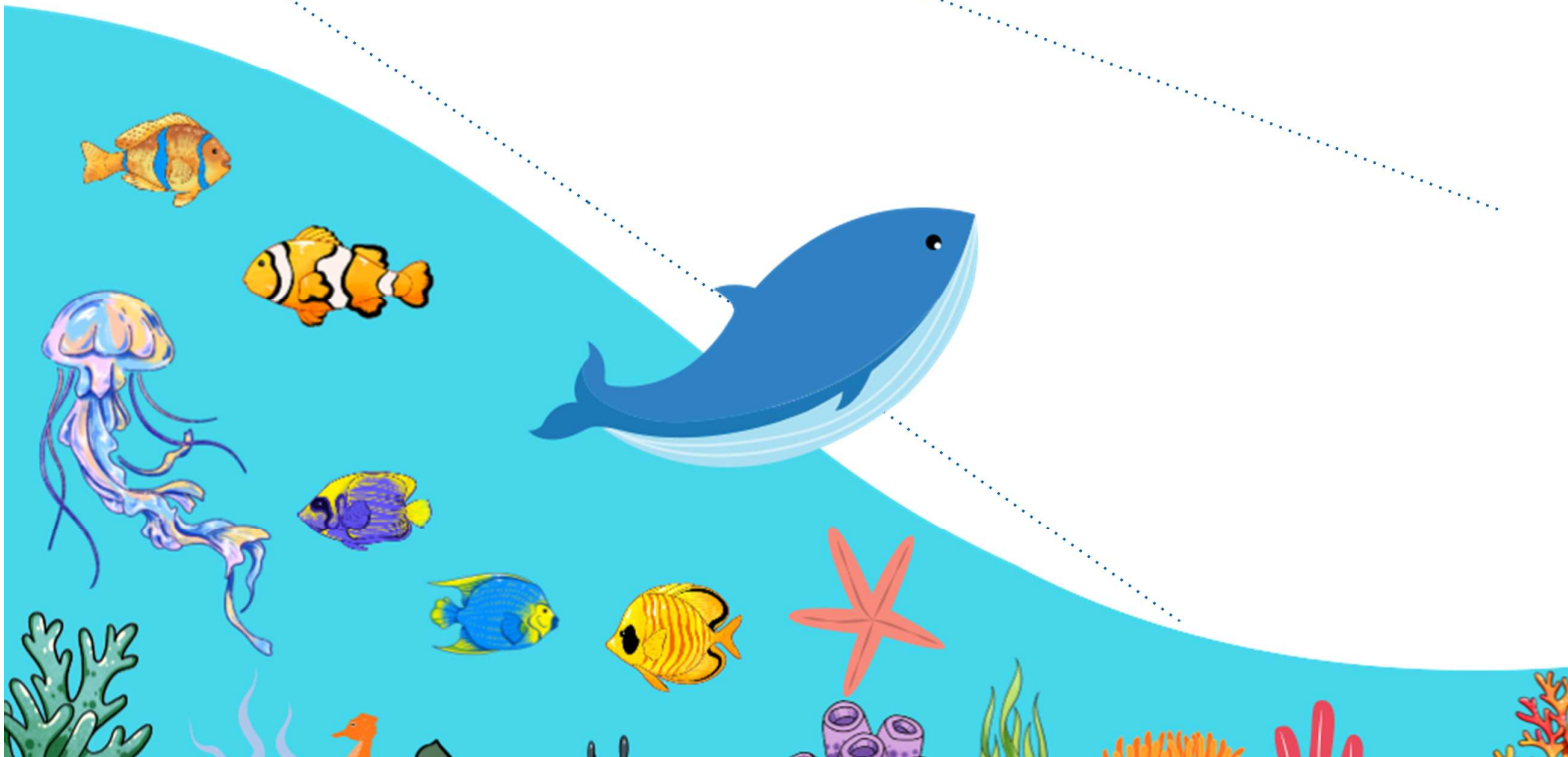
Penutup	29
---------	----

BAB I | Pendahuluan



- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- B. Sumber Daya Manusia
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Peran Strategis
- E. Permasalahan
- F. Upaya Pemecahan Masalah

Lincahnya lumba-lumba yang melompat di atas ombak menjadi tanda harmoninya alam. Begitu pula Kemenkeu, yang terus bergerak dinamis membawa harapan dan stabilitas bagi perekonomian Indonesia.



BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

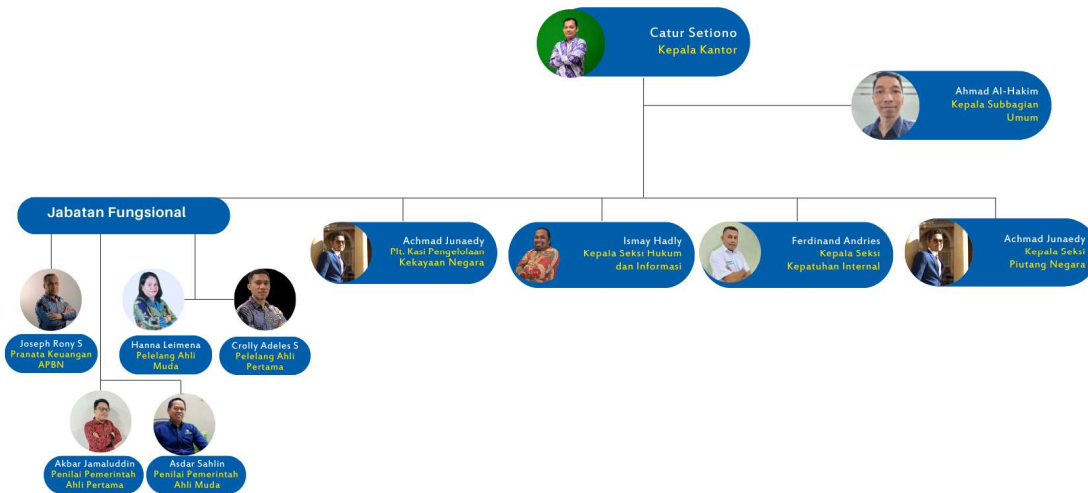
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dimana Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon di bawah Lingkup Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku merupakan unit instansi vertikal DJKN terdiri dari 1 jabatan struktural eselon III (kepala kantor), jabatan eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri sebagai berikut.

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik Negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, bimbingan teknis dan evaluasi, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik Negara/kekayaan Negara.
3. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang Negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang Negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.
4. Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang Negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang Negara dan hasil lelang.

5. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon saat ini dapat dilihat pada Bagan I.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon



Penjelasan struktur organisasi KPKNL Ambon :

1. Kepala Kantor;
2. Kepala Sub Bagian Umum (Kasubbag. Umum), dengan 5 (lima) pelaksana termasuk 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran;
3. Plt. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (Kasi PKN), dengan 3 (tiga) orang pelaksana;
4. Kepala Seksi Piutang Negara (Kasi PN), dengan 1 (satu) orang pelaksana;
5. Kepala Seksi Hukum dan Informasi (Kasi HI), dengan 2 (dua) orang pelaksana termasuk 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan;
6. Kepala Seksi Kepatuhan Internal (Kasi KI), dengan 1 (satu) orang pelaksana; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

KPKNL Ambon berkedudukan di Jalan Raya Pattimura No. 18 (Gedung Keuangan

Negara Lt. IV), Ambon, memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Prov. Maluku yang terdiri dari 2 (dua) Kota dan 9 (sembilan) Kabupaten, yaitu :

1. Kota Ambon
2. Kota Tual
3. Kabupaten Maluku Barat Daya
4. Kabupaten Kepulauan Tanimbar (dh. Kabupaten Maluku Tenggara Barat)
5. Kabupaten Kepulauan Aru
6. Kabupaten Maluku Tenggara
7. Kabupaten Maluku Tengah
8. Kabupaten Seram Bagian Barat
9. Kabupaten Seram Bagian Timur
10. Kabupaten Buru Selatan
11. Kabupaten Buru

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KPKNL Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan Negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang Negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang Negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau

- penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
 11. Inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan;
 12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang Negara dan lelang;
 13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang Negara dan hasil lelang;
 14. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia sebagai unsur yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPKNL Ambon per tanggal 31 Desember 2024 berjumlah 21 (dua puluh satu) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Ambon dapat dijelaskan pada tabel-tabel sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total orang
1	I	-	-	-
2	II	4	1	5
3	III	14	2	16
4	IV	-	-	-

2. Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Unit Kerja	Jml	Eselon			
		Peg	II	III	IV	Pelaksana
1	Kepala Kantor	1	-	1	-	-
2	Subbagian Umum	5	-	-	1	4
3	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	3	-	-	-	3
4	Seksi Piutang Negara	2	-	-	1	1
5	Seksi Hukum dan Informasi	3	-	-	1	2
6	Seksi Kepatuhan Internal	2	-	-	1	1
7	Kelompok Jabatan Fungsional	5	-	-	-	-
Total		21	-	1	4	11

3. Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Jml	Golongan			
		Peg	I	II	III	IV
1	SLTA	1	0	0	1	0
2	D I	1	0	1	0	0
3	D III	4	0	4	0	0
4	D IV / S1	11	0	0	11	0
5	S2	4	0	0	4	0
6	S3	0	0	0	0	0
Total		21	0	5	16	0

4. Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Pelelang/Pejabat Lelang	2
2	Penilai Kekayaan Negara	2
3	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
Total		5

C. SARANA DAN PRASARANA

KPKNL Ambon berlokasi di Jalan Raya Pattimura No. 18 (Gedung Keuangan Negara Lt. IV), Ambon. Ruang kerja yang digunakan oleh KPKNL Ambon adalah salah satu ruang Gedung Keuangan Negara Ambon di Lantai 4 yang digunakan sejak tahun 1995 dengan luas ruang kantor 1.572 m² dengan pembagian ruang kerja sebagai berikut : Ruang Area Pelayanan Terpadu (APT) yang dilengkapi dengan CCTV, ruang tunggu, ruang Kepala KPKNL, ruang kerja terbuka untuk Kepala Seksi, Jabatan Fungsional dan Pelaksana, ruang Bendahara Pengeluaran, ruang Bendahara Penerimaan, ruang Gudang ATK, ruang Rapat, ruang Sekretariat, ruang Server, ruang BKPN, ruang Minut Risalah Lelang dan kamar mandi/toilet, Ruang Pertemuan (Aula), ruang Konsultasi, ruang Laktasi (menyusui), ruang Arsip dan ruang dapur (*Pantry*) serta kamar mandi/toilet;

Disamping itu, KPKNL Ambon memiliki sarana dan prasarana penunjang guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi berupa :

1. Kendaraan dinas jabatan sebanyak 1 (satu) unit ;

2. Kendaraan operasional sebanyak 4 (empat) unit roda empat dan 4 (empat) unit sepeda motor;
3. Komputer (PC) sebanyak 23 unit (semua dalam kondisi baik), laptop 24 unit (semua dalam kondisi baik), Tablet PC 1 unit (kondisi baik), Scanner Peralatan PC 4 unit (semua dalam kondisi baik) dan printer sebanyak 24 unit (semua dalam kondisi baik);
4. Rumah dinas untuk para pejabat sebanyak 8 (delapan) unit yang berdiri diatas dua bidang tanah KPKNL Ambon, yang berstatus Hak Pakai. Rumah dinas tersebut terdiri dari : 1 (satu) unit Rumah Dinas Kepala kantor ukuran 70 m² dan 7 (tujuh) unit Rumah Dinas untuk kasubbag umum dan para kepala seksi dengan ukuran masing-masing 50 m².

D. PERAN STRATEGIS

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi DJKN di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang, KPKNL Ambon memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran Strategis KPKNL Ambon di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara adalah mengoptimalkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasilguna kekayaan Negara yang difokuskan pada utilisasi kekayaan Negara, pengamanan kekayaan Negara. Selain itu KPKNL Ambon juga memiliki tugas melaksanakan Penilaian Aset (BMN) yang berperan strategis untuk menyediakan informasi nilai wajar sekaligus analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*Highest and Best Use* atau HBU).

2. Memberikan pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Ambon di bidang Pengurusan Piutang Negara adalah penyelamatan keuangan Negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* (NPL) menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan melalui proses penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan unit lain sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Memberikan pelayanan Lelang

KPKNL Ambon berperan dalam pelayanan lelang baik lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi. Dengan keuntungan yang ditawarkan yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Diharapkan KPKNL dapat ikut berperan mendukung penyelesaian kredit macet melalui *disposal asset*.

Seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi informasi maka metode penjualan barang melalui lelang juga turut berkembang, salah satunya implementasi

penjualan lelang melalui internet (*e-auction*).

Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Ambon senantiasa mengupayakan penggalan lelang secara terus-menerus baik lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi, sehingga lelang menjadi salah satu sarana jual beli yang diminati masyarakat dan juga menjadi salah satu terobosan untuk ikut serta dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.

4. Memberikan kontribusi pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang Negara, KPKNL Ambon memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) pengelolaan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Ambon memperoleh hasil bea lelang termasuk biad lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP.

E. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPKNL Ambon Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif, Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

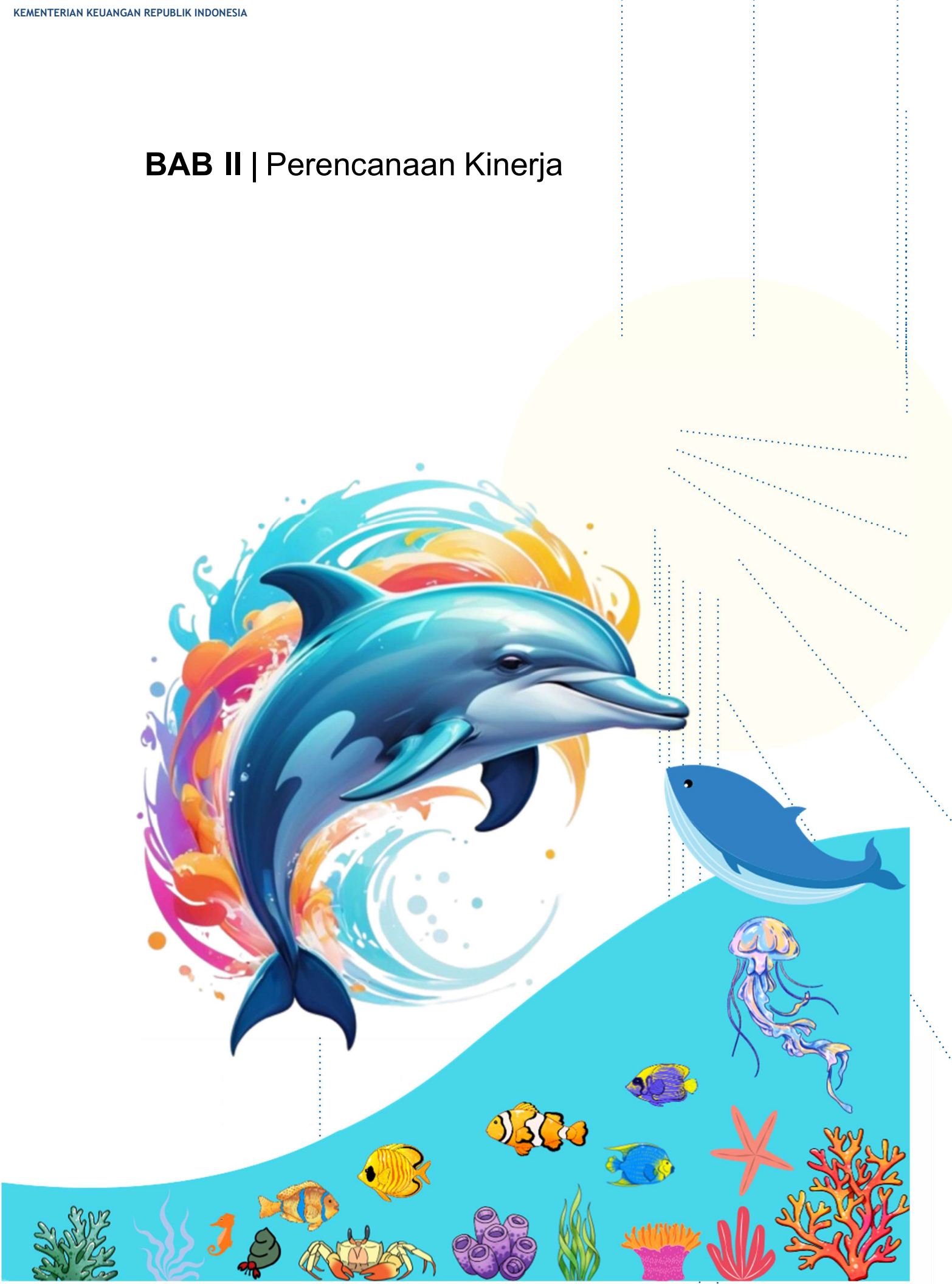
Bab I. Pendahuluan, Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, peran strategis dan sistematika laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja.

Bab IV. Penutup, Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang..

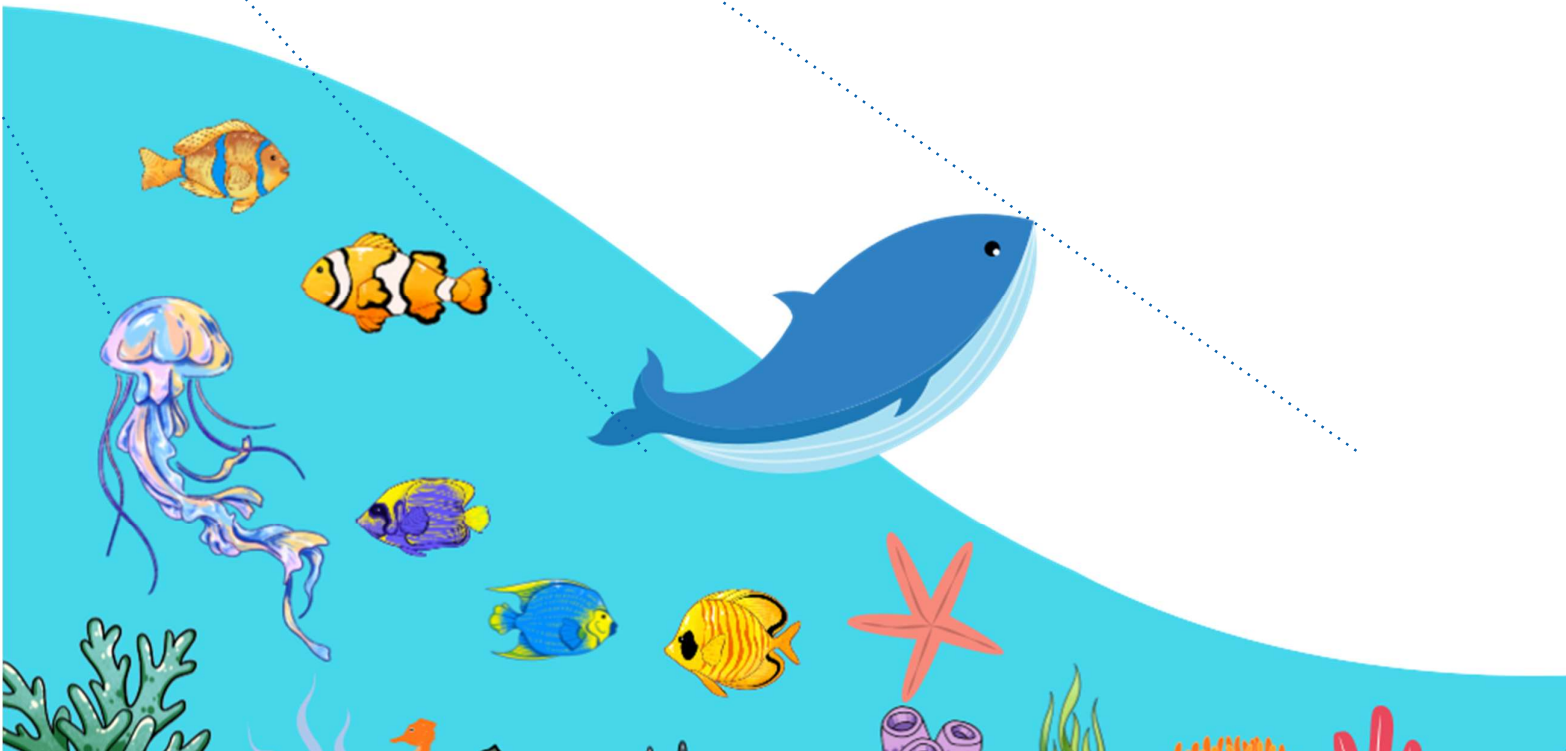
BAB II | Perencanaan Kinerja



- a. L
- b. T
- c. M
- d. Pr
- e. Sistematika Pel

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2024
- C. Pengukuran Kinerja

Kecerdasan lumba-lumba yang mampu berkomunikasi dan bekerja sama menunjukkan pentingnya kolaborasi. Begitu pula Kemenkeu, yang terus menjalin sinergi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan Negara, piutang Negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan **visi DJKN**, yaitu **"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"**. Pengertian **profesional** dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan Negara, penilaian, pengurusan piutang Negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. **Akuntabel** artinya pengelolaan kekayaan Negara, penilaian, pengurusan piutang Negara, dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. **Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat** merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan Negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

1. Misi

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi yaitu:

- a. mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Negara;

- b. mengamankan kekayaan Negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- c. meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan Negara;
- d. menghasilkan nilai kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
- e. mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif, sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

2. Tujuan

- a. Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif sertamemberi manfaat finansial dan sosial;
- b. pelayanan Lelang yang modern dan terpercaya;
- c. pelayanan Penilaian yang akuntabel dan efisien; dan
- d. birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

3. Sasaran Strategis

- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - Pengelolaan kekayaan Negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
- c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
- d. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - Organisasi dan SDM yang optimal;
 - Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - Komunikasi publik yang efektif.

4. Kebijakan dan Program Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui kebijaksanaan dan program.

a. Kebijakan

Kebijakan Pengurusan Piutang, Lelang, Kekayaan Negara dan Penilaian Kekayaan Negara telah ditetapkan meliputi:

- 1) peningkatan kualitas pelayanan pengurusan Piutang Negara
- 2) peningkatan pengelolaan barang jaminan
- 3) peningkatan kualitas Pelayanan Lelang
- 4) peningkatan kualitas penyajian informasi dan penatausahaan pengurusan Piutang Negara dan lelang serta pengoptimalan penanganan perkara
- 5) optimalisasi Barang milik Negara
- 6) penilaian Kekayaan Negara
- 7) peningkatan pemberian dukungan teknis dan administratif KPKNL Ambon; dan
- 8) melaksanakan cara kerja *New Normal* dalam melaksanakan tugas (rapat daring, WFO, WFH, dan WFHB).

b. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijaksanaan yang dijalankan oleh KPKNL Ambon diuraikan dalam program sebagai berikut :

- 1) percepatan pelayanan Pengurusan Piutang Negara;
- 2) pengaman barang jaminan;
- 3) percepatan pelayanan Lelang;
- 4) mengoptimalkan sistem administrasi data Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang, dan Lelang;
- 5) mengoptimalkan upaya penyelesaian Perkara;
- 6) pelayanan di Bidang Umum yang meliputi: Kepegawaian, Keuangan, dan TURT;
- 7) tertib administrasi BMN;
- 8) optimalisasi utilisasi kekayaan Negara; dan
- 9) penilaian BMN.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Ambon harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut, dirumuskan Sasaran Strategis KPKNL Ambon Tahun 2024 yang telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Ambon tersebut di atas.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	
			Kuantitas/Output	Kualitas/Mutu
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Tingkat Pemenuhan Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan	95	95
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (Rp 10.881.231.518)	100
		Indeks Integritas	89,17	100
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,50	100
		Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5	100
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100 (Rp 221.680.000.000)	100
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (Rp 420.078.713)	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	
			Kuantitas/Output	Kualitas/Mutu
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	100
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100 (275 Bidang)	100
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100 (188 NUP)	100
		Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100	100
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	83 (24 BKPN)	100
		Persentase Produktivitas Lelang	89	100
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	100
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90	100
		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	100
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100
		Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10	100
10	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	100
		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian indikator kinerja DJKN Tahun 2024, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dikonversi menjadi 120%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*. IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan
2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*
Indeks Capaian = $[1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$
IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.
3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*
IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan

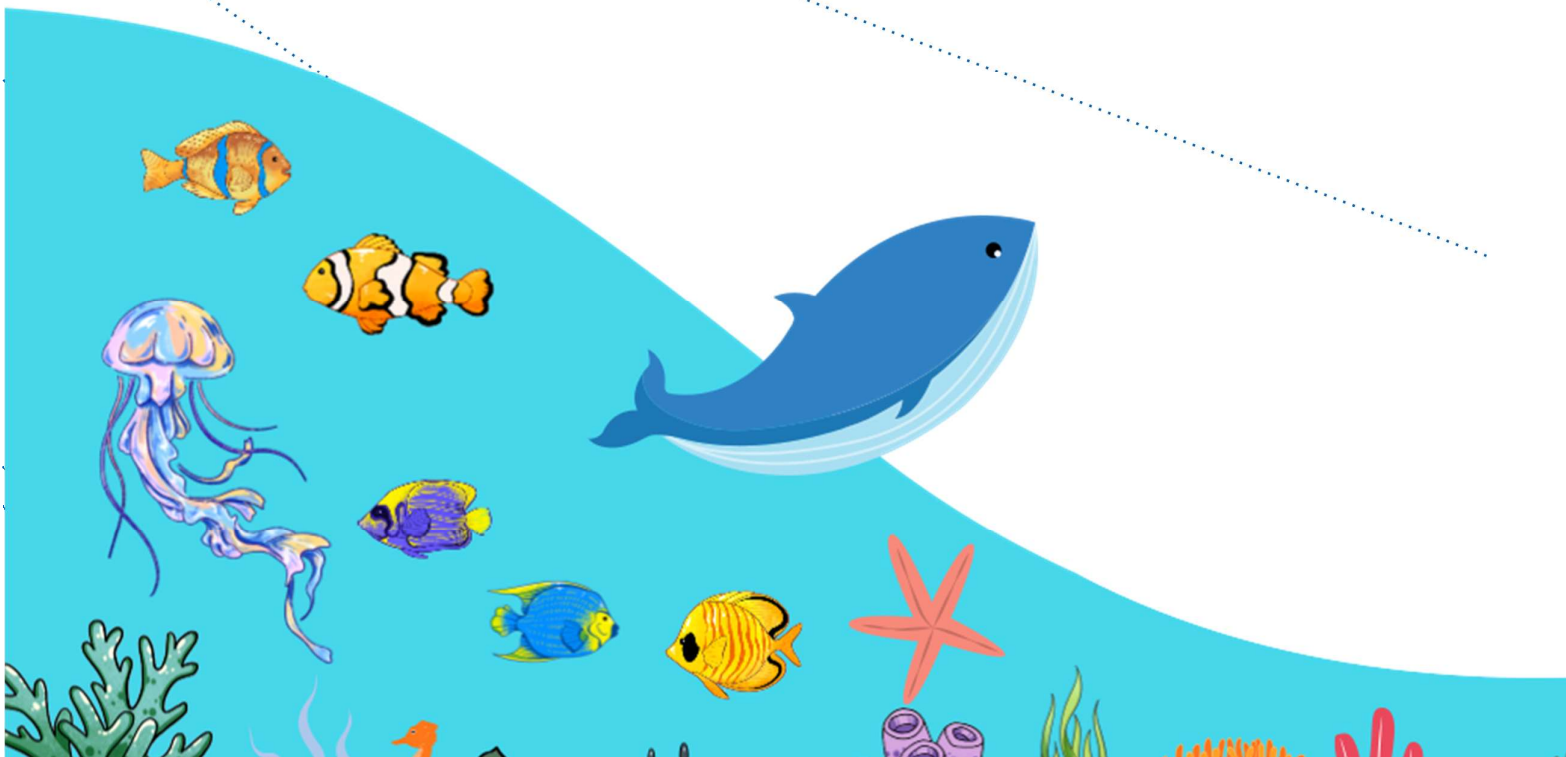
ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III | Akuntabilitas Kinerja



- A. Capaian Kinerja Organisasi 2024
- B. Realisasi Anggaran

Kecepatan dan kelincahan lumba-lumba saat berenang mencerminkan pentingnya adaptasi dalam menghadapi tantangan. Begitu pula Kemenkeu, yang terus bergerak lincah dalam mendukung stabilitas dan pembangunan ekonomi Indonesia.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2024

No.	Nama IKU	NKO	WARNA	Penanggung Jawab
1	Tingkat Pemenuhan Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan	112,19%	hijau	PKN, PN, JF Pelelang dan JF Penilai
2	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	120,00%	hijau	PKN, PN, JF Pelelang
3	Indeks Integritas	103,67%	hijau	KI
4	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	120,00%	hijau	PKN
5	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	115,61%	hijau	PKN
6	Persentase Realisasi Pokok Lelang	82,29%	kuning	JF Pelelang
7	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	120,00%	hijau	PN
8	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	120,00%	hijau	JF Penilai
9	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	120,00%	hijau	PKN
10	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	120,00%	hijau	PKN
11	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN <i>Idle</i>	100,00%	hijau	PKN
12	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	120,00%	hijau	PN
13	Persentase Produktivitas Lelang	120,00%	hijau	JF Pelelang
14	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	120,00%	hijau	JF Penilai
15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	120,00%	hijau	Seluruh Pegawai KPKNL Ambon
16	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	116,24%	hijau	KI
17	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	120,00%	hijau	JF Pranata APBN
18	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	120,00%	hijau	HI dan Subbag Umum
19	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	115,21%	hijau	KI
20	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	120,00%	hijau	HI dan Subbag Umum
Total		115,28%	hijau	

Dari hasil pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu Three KPKNL Ambon tahun 2024 sebagaimana diatas, maka untuk evaluasi dan analisis kinerja dapat dirinci sebagai berikut :

SS 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk

1. Tingkat Pemenuhan Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan 112,19%
2. Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang 120,00%
3. Indeks Integritas 103,67%

Realisasi penerimaan negara dan pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2024 sebesar Rp.15.910.767.312 atau sebesar 146,22% (120% dalam indeks maks 120%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.10.881.231.518.

SS 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan 120%
2. Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN 115,61%

IKU dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa tersebut, semuanya dapat tercapai karena pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepada Satuan Kerja yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

SS 3: Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

1. Persentase Realisasi Pokok Lelang 82,29%
2. Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara 120,00%

Realisasi Persentase Realisasi Pokok Lelang sebesar 82,29% atau sebesar Rp182.421.770.741, dari Target sebesar Rp.221.680.000.000 tersebut dapat tercapai karena pelaksanaan penggalan potensi dan

edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan kelebihan lelang.

Realisasi Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara sebesar 1.087,58% (120% dalam indeks maks 120%) atau sebesar Rp7.593.266.445, dari Target sebesar Rp.420.078.713. hal tersebut dapat tercapai karena pelaksanaan penggalan potensi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan kelebihan lelang.

SS 4: Layanan Penilaian yang *Agile*, Efektif, dan Efisien

1. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian 120,00%

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian sebesar 143,33% (120% dalam indeks maks 120%) dari target sebesar 75% dapat tercapai karena pelaksanaan penilaian yang terjadwal dengan baik.

SS 5: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

1. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan 120%
2. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) 120%
3. Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN *Idle* 100%

Tahun 2024 IKU dari Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif semuanya mencapai target bahkan melampaui target, hal ini disebabkan realisasi:

- a. pemahaman yang baik oleh satker tentang pentingnya pengelolaan BMN secara tertib khususnya terhadap BMN berupa tanah;
- b. terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antara KPKNL Ambon, Kanwil BPN Maluku serta Satker-satker dalam hal kerjasama pengelolaan BMN secara tertib;
- c. segala permasalahan dapat dimitigasi dengan baik oleh KPKNL Ambon

SS 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

1. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara 120%;
2. Persentase Produktivitas Lelang 120%.

IKU dari Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif semuanya mencapai target bahkan melampaui target, hal ini disebabkan koordinasi yang intensif dengan *stakeholder*.

SS 7: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

1. Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian 120%

Selama Tahun 2024 Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian sebesar 0% dari target 16%. Apabila dikonversi dalam indeks maka nilainya sebesar 200% (120% dalam indeks maks 120%). Hal ini dapat tercapai karena hasil penilaian yang baik dari Penilai.

SS 8: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

1. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai 120%
2. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko 116,24%

Realisasi dari persentase pengembangan kompetensi pegawai mencapai 124,44% (120% dalam indeks maks 120%) dari target sebesar 90%, hal ini terjadi karena pengelolaan kinerja pada KPKNL Ambon berbasis BSC. Capaian ini menunjukkan perhatian yang tinggi dari Kepala KPKNL Ambon terhadap kebutuhan pegawai yang mempunyai kemampuan dan keahlian tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, dibuktikan dengan banyaknya dan seringnya pegawai ditugaskan untuk mengikuti berbagai diklat dan sosialisasi.

SS 9: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

1. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran 120.00%
2. Persentase Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN 120%

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencapai 120% dari target sebesar 100% dapat tercapai karena Pengelolaan Anggaran yang baik.

SS 10: Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah

1. Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) 115,21%;
2. Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM 120%

Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM tercapai sebesar 120% dari target 100%. Keberhasilan ini merupakan wujud KPKNL Ambon untuk membangun Zona Integritas

serta memberikan pelayanan yang terbaik dan bebas korupsi kepada *stakeholder*.

Capaian yang diraih oleh KPKNL Ambon dalam waktu 5 tahun terakhir mengalami naik turun. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor umum yaitu:

1. adanya pandemi Covid-19 membuat capaian pada 2020 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 mengalami perbaikan seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kerja keras KPKNL Ambon dan para *stakeholder*; dan
2. Indikator Kinerja Utama yang setiap tahun selalu mengalami pembaruan dan lebih menantang sehingga memerlukan waktu adaptasi dalam proses pencapaiannya.

Meskipun dengan berbagai hambatan dalam mencapai target kinerja, seluruh jajaran KPKNL Ambon memberikan kinerja terbaik sehingga mendapatkan capaian yang maksimal.

Guna menunjang kinerja KPKNL Ambon, berbagai inovasi layanan juga disusun agar memberikan kemudahan menjangkau *stakeholder*. Adapun beberapa inovasi layanan yaitu:

1. Aplikasi PN (SEMANGAT);
2. Aplikasi Monitoring Penilaian;
3. *Whatsapp Information Center*;
4. *Dashboard* Layanan Katong;
5. Layanan Klinik Pengelolaan BMN;
6. Percepatan SOP; dan
7. *Dashboard* yang memberikan data capaian kinerja.

Selain itu, pada tahun 2024 KPKNL Ambon dapat mempertahankan predikat ZI-WBK/WBBM. Hal tersebut tercapai karena kinerja dan komitmen seluruh jajaran KPKNL Ambon untuk memberikan pelayanan kepada *stakeholder* dengan berlandaskan integritas. Selanjutnya, tentu saja KPKNL Ambon akan berusaha meningkatkan penguatan integritas serta kualitas pemberian layanan sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang termuat dalam KMK Nomor 395/KM.1/2024 sehingga kegiatan ZI-WBK/WBBM pada periode mendatang akan terus berjalan dengan optimal.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran KPKNL Ambon di tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.776.939.681,- atau 88.56% dari Pagu yang disediakan sebesar Rp 2.006.539.000,-. Pada tahun 2025 KPKNL Ambon mendapat alokasi pagu DIPA sebesar Rp 2.413.583.000,- yang terdiri dari belanja barang Rp 1.783.092.000- belanja modal Rp 630.491.000,-.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan melalui Indikator Kinerja kegiatan yang ada dibiayai dari DIPA Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Capaian Keluaran Dan Capaian Komponen

No	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
								RVR	Progres	RVR	Progres	RVR	Progres	RVR	Progres	RVR	Progres	RVR	Progres	RVR	Progres	RVR	Progres	RVR	Progres	RVR	Progres	RVR	Progres	RVR	Progres
1	CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan	4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	AEF Sosialisasi dan Diseminasi (orang, kegiatan)	001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara (orang)	70	90	100	25	35,71	20	28,58	0	0	0	1	0	1	25	33,71	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
2	CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan	4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	AEF Sosialisasi dan Diseminasi (orang, kegiatan)	002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara (orang)	24	24	100	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	24	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan	4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	AEF Sosialisasi dan Diseminasi (orang, kegiatan)	003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang (orang)	60	60	100	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	30	44	0	0	30	50	0	0	0	0	0	0
4	CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan	4798 Pengelolaan Aset	AAH Peraturan lainnya (peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan)	001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara (Surat Keputusan)	50	175	100	20	40	14	28	26	32	22	0	8	0	39	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan	4798 Pengelolaan Aset	AAH Peraturan lainnya (peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan)	002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara (Surat Keputusan)	7	10	100	0	1	0	1	0	1	0	1	1	14,29	1	14,29	0	1	1	14,29	1	14,29	1	14,29	1	14,29	4	9,26
6	CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan	4798 Pengelolaan Aset	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	002 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset (Rekomendasi Kebijakan)	92	230	100	20	21,74	25	27,17	43	46,74	0	1	32	3,35	4	0	6	0	0	0	0	0	49	0	33	0	18	0
7	CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan	4798 Pengelolaan Aset	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	003 Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) (Rekomendasi Kebijakan)	#####	#####	100	0	1	90	3,01	241	8,07	295	9,88	295	9,88	295	9,88	439	14,7	295	9,88	620	20,76	108	3,62	308	9,32	0	0
8	CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan	4798 Pengelolaan Aset	BAE Pelayanan Publik kepada UMKM (UMKM)	301 Riset/ Lelang Sukarela UMKM (PU) (UMKM)	20	20	100	0	1	0	1	0	1	0	1	10	50	3	15	0	1	0	1	3	15	2	4	2	10	0	0
9	CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan	4798 Pengelolaan Aset	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	001 Risaiah Lelang (dokumen)	100	292	100	13	13	9	9	24	24	12	12	22	22	16	16	22	4	30	0	10	0	30	0	26	0	38	0
10	CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan	4798 Pengelolaan Aset	FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Rekomendasi)	004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara (Rekomendasi)	1	4	100	0	1	0	1	1	98	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
11	CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan	4798 Pengelolaan Aset	FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Rekomendasi)	005 Rekomendasi Hasil Penilaian (Rekomendasi)	1	2	100	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	94	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12	CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan	4798 Pengelolaan Aset	FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Rekomendasi)	007 Penggalan Potensi Lelang (Rekomendasi)	2	5	100	0	1	0	1	0	1	0	1	1	50	1	46	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
13	CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan	4798 Pengelolaan Aset	FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Rekomendasi)	301 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU) (Rekomendasi)	58	423	100	0	1	33	56,9	77	42,1	55	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	104	0	152	0	0	0	0
14	CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan	4798 Pengelolaan Aset	FAK Pengelolaan Aset BUN (Unit, Aset)	001 Aset BUN yang Dikelola (Aset)	19	13	100	0	1	0	1	0	1	0	1	2	15,38	2	15,38	2	11,38	2	15,38	2	15,38	2	15,38	1	7,72	0	0
15	WA Program Dukungan Manajemen	4700 Legistasi dan Litigasi	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	969 Layanan Bantuan Hukum (Layanan)	5	5	100	0	1	1	20	0	1	0	1	1	20	2	40	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	WA Program Dukungan Manajemen	4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	002 Kerumahahtgaan (Layanan)	12	12	100	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33
17	WA Program Dukungan Manajemen	4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	12	12	100	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33	1	8,33
18	WA Program Dukungan Manajemen	4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	001 Peralatan Fasilitas Perkantoran (Unit)	39	39	100	0	1	0	1	4	10,26	0	1	0	1	35	85,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	WA Program Dukungan Manajemen	4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	BMB Komunikasi Publik (layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume)	001 Pembinaan/Edukasi Publik (Orang)	34	34	100	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	34	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	WA Program Dukungan Manajemen	4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	BMB Komunikasi Publik (layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume)	002 Kehumasan (kegiatan)	2	7	100	1	50	0	0	1	50	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	WA Program Dukungan Manajemen	4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	BMB Komunikasi Publik (layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume)	003 Pameran/Exhibisi (kegiatan)	2	2	100	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	45	0	0	0	0	0	0	0	1	50	0	0	0
22	WA Program Dukungan Manajemen	4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan,)	001 Rekomendasi Kepatuhan Internal (Dokumen)	5	5	100	0	1	1	20	1	20	0	1	0	1	1	17	1	20	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Sesuai PMK Nomor 466//2023

a. Data Bobot dan Capaian IKPA

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	061	015	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	Nilai	100.00	84.88	87.71	100.00	100.00	97.15	100.00	94.99	100%	0.00	94.99
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.73	17.54	10.00	10.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	92.44			96.21			100.00				

b. Nilai SMART DJA

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	53804	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	100,00	94,99	97,50

3. Konsistensi Rencana Penarikan Dana

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan
Tahun Anggaran 2024
Nomor : DIPA-015.09.2.538044/2024
Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 015.09.2.538044/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



09.2484-7733-9031-2143

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) Ditjen Kekayaan Negara
Provinsi : (21) MALUKU
Kode>Nama Satker : (538044) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON													
		RENCANA PENARIKAN DANA	34.820	105.408	195.939	92.904	144.969	214.231	105.472	210.597	102.242	186.349	132.325	481.197	2.006.539
		BELANJA BARANG	34.820	105.408	116.469	92.904	144.969	67.243	69.028	210.597	102.242	186.349	132.325	456.117	1.718.557
		BELANJA MODAL	0	0	79.470	0	0	146.988	36.444	0	0	0	0	25.080	287.982
	015.09.CD.4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	0	1.675	0	0	2.118	739	1.608	7.590	0	0	0	8.718	22.443
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	1.675	0	0	2.118	739	1.608	7.590	0	0	0	8.718	22.443
	015.09.CD.4798	Pengelolaan Aset	23.519	25.404	15.687	14.062	68.057	13.723	19.951	65.814	3.362	32.200	8.000	212.447	502.243
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	23.519	25.404	15.687	14.062	68.057	13.723	19.951	65.814	3.362	32.200	8.000	212.447	502.243
	015.09.WA.4700	Legislasi dan Litigasi	0	0	0	360	360	0	1.080	0	5.211	0	0	6.687	13.696
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	360	360	0	1.080	0	5.211	0	0	6.687	13.696
	015.09.WA.4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	9.423	65.648	177.132	78.158	67.910	194.600	82.502	113.741	93.670	134.149	124.325	220.771	1.362.121
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	9.423	65.648	97.662	78.158	67.910	47.612	46.149	113.741	93.670	134.149	124.325	195.691	1.074.135
	015.09.WA.4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	1.878	120	1.552	304	6.523	5.173	240	6.513	0	5.000	0	28.442	55.746
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.878	120	1.552	304	6.523	5.173	240	6.513	0	5.000	0	28.442	55.746
	015.09.WA.4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	0	12.649	1.568	0	0	0	0	16.936	0	15.000	0	4.132	50.268

4. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Triwulan I

FILTER: **SAMPAI DENGAN | MARET** CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	061	015	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			100.00			100.00				

Triwulan II

FILTER: **SAMPAI DENGAN | JUNI** CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	061	015	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	Nilai	100.00	89.18	85.18	100.00	100.00	98.91	100.00	95.30	100%	0.00	95.30
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.38	17.04	10.00	10.00	9.89	25.00				
					Nilai Aspek	94.59			96.02			100.00				

Triwulan III

FILTER: **SAMPAI DENGAN | SEPTEMBER** CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	061	015	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	Nilai	100.00	82.82	83.97	100.00	100.00	99.34	100.00	94.15	100%	0.00	94.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.42	16.79	10.00	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	91.41			95.83			100.00				

Triwulan IV

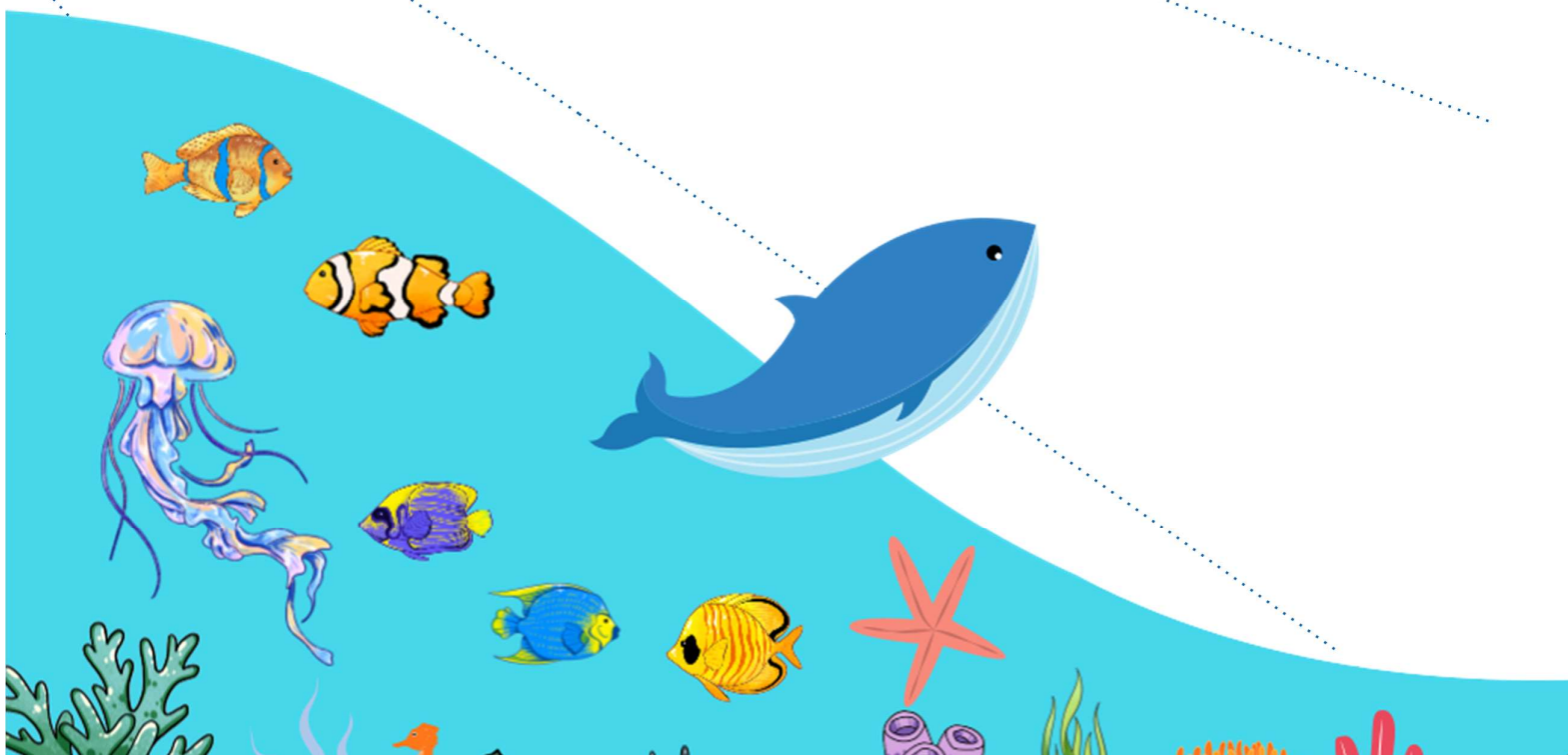
FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER** CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	061	015	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON	Nilai	100.00	84.88	87.71	100.00	100.00	97.15	100.00	94.99	100%	0.00	94.99
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.73	17.54	10.00	10.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	92.44			96.21			100.00				

BAB IV | Penutup



Keberanian dan rasa ingin tahu lumba-lumba dalam menjelajahi lautan yang luas mencerminkan pentingnya inovasi dan eksplorasi untuk mencapai kemajuan. Begitu pula Kemenkeu, yang terus berinovasi untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Ambon ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Ambon sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintahan. Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Ambon ditetapkan berdasarkan peta strategis Kemekeu- Three yang terdiri dari 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah disampaikan pada BAB III, rata-rata pencapaian kinerja KPKNL Ambon (NKO) tahun 2024 sebesar 115.28% yang berarti pencapaian kinerja di atas 100%. Dari hasil kinerja tersebut, 19 IKU capaiannya hijau dan hanya 1 IKU yang capainya berwarna kuning. Secara umum Pencapaian NKO Tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 (114,23%).

Keberhasilan yang dicapai oleh KPKNL Ambon sudah menunjukkan bahwa telah semakin dihayati dan dilaksanakannya nilai-nilai Kementerian Keuangan oleh seluruh jajaran KPKNL Ambon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

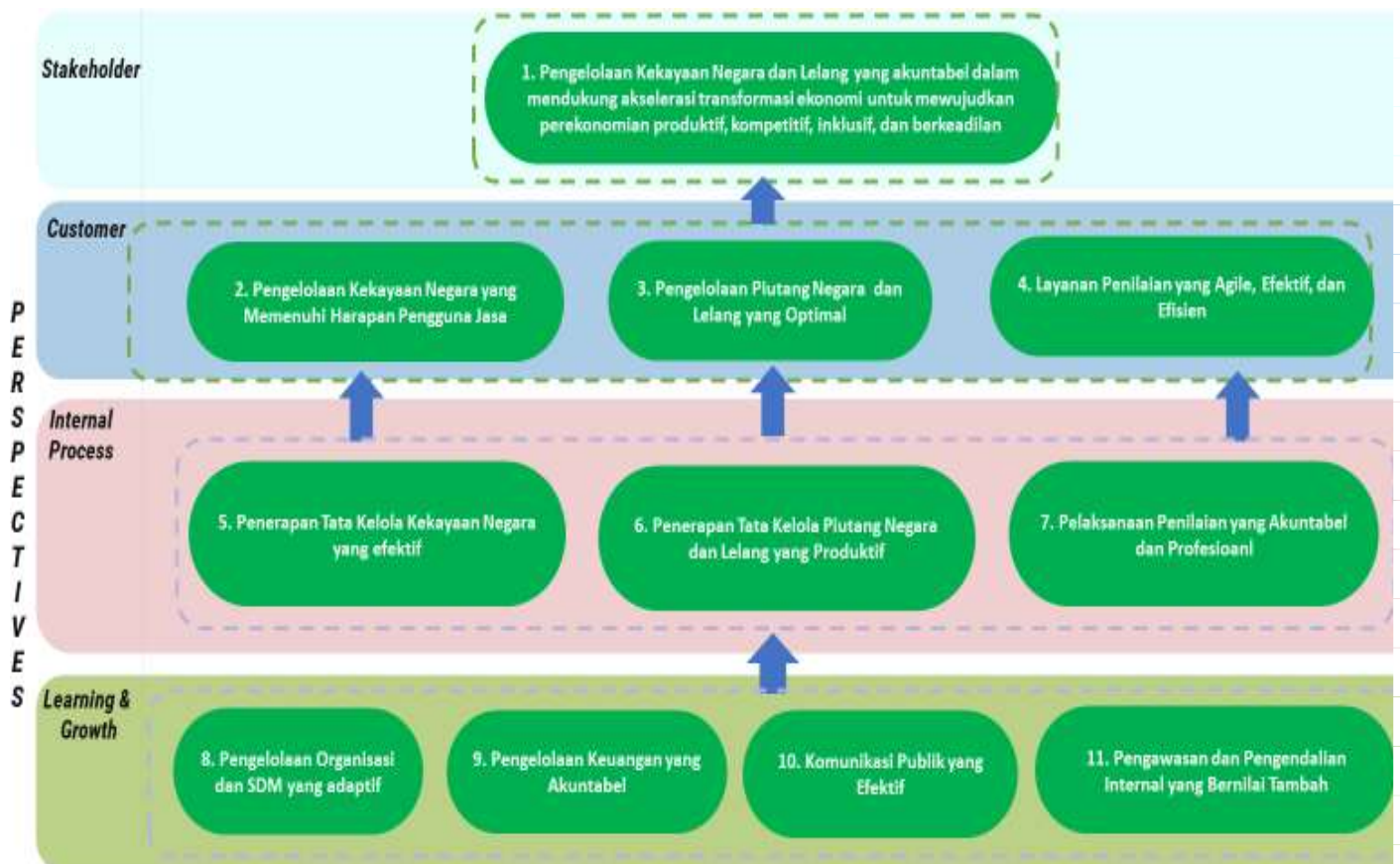
Adanya masalah/kendala dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diuraikan pada BAB I, bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak berbuat yang terbaik bagi organisasi, dengan bekerja lebih giat lagi serta terus menerus mengamalkan nilai-nilai dari Kementerian Keuangan. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik, bahkan terus berusaha untuk meningkatkannya.

**LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
TAHUN 2024**



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-01/WKN.17/2024
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan	100%
		1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp10,8M)
		1c-CP	Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71.5%
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86.5%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp221,68 M)
		3b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp420,07 Jt)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Berkas Kasus Piutang Negara	86% (25 berkas)
		6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%
		8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
		9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%
10	Komunikasi Publik yang efektif	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80

No	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah	11a-N	Indeks Efektivitas UKI	82
		11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZIWBK/WBBM	100%

Program/Kegiatan Tahun 2024**Anggaran**

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp524.686.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp22.443.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	-
3. Pengelolaan Aset	Rp502.243.000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	-
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	-
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-
Dukungan Manajemen	Rp1.481.853.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp13.698.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.362.121.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp55.746.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	-
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp50.288.000
6. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	-

Kepala Kantor Wilayah Papua,
Papua Barat dan Maluku



Ditandatangani secara elektronik
Wibawa Pram Sihombing
NIP 19760906 199903 1 001

Ambon, 12 Maret 2024
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Ambon



Ditandatangani secara elektronik
Catur Setiono
NIP 19770927 199803 1 001



RINCIAN TARGET KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	SS/IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q ₃	Q4	Y	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan								
	1a-CP	Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
	1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1c-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71.5%	71.5%
	2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	45%	45%	-	45%	86,5%	86,5%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal								
	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien								
	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif								
	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
	5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	93%	93%	90%	90%	86%	86%
	6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional								

No	SS/IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q ₃	Q4	Y	
	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif								
	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	90%	90%
	8b-N	Indeks kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel								
	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
	9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
10	Komunikasi Publik yang Efektif								
	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah								
	11a-CP	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
	11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%

Jakarta, 12 Maret 2024
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Ambon



Ditandatangani secara elektronik
Catur Setiono
NIP 198208312004121001



INISIATIF STRATEGIS
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	SS : Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal IKI : Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	Melakukan penelusuran ulang atas berkas Piutang Negara dengan kondisi PSBDT	1. Menurunkan nilai outstanding Piutang Negara 2. Meningkatkan biaya administrasi dari Piutang Negara	TW I : PSBD T, angsuran TW II : Penggalian Potensi, angsuran TW III: PSBD T, angsuran TW IV : Intensifikasi penagihan, angsuran	TW I : Penurunan Outstanding ,biad TW II : Penurunan Outstanding ,biad TW III : Penurunan Outstanding ,biad TW IV : Penurunan Outstanding , biad	Q1 s.d Q4 Tahun 2024	Seksi Piutang Negara	Rp54.168.000
2	SS : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif IKI : Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	Melakukan koordinasi percepatan pelaksanaan sertipikasi BMN dengan BPN dan PJJN	Percepatan penerbitan Sertipikat BMN berupa tanah sebanyak target yang ditetapkan	TW I : Koordinasi Penyampaian Target TW II : Monitoring Capaian TW III: Monitoring Capaian s.d. TW III TW IV : Monitoring Capaian s.d. TW IV	TW I : Surat ke Satker dan Rakor TW II : Rakor dengan Satker TW III : Rakor Capaian s.d. TW III TW IV : Rakor Capaian s.d. TW IV	Q1 s.d Q4 Tahun 2024	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp36.372.000
3	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa IKI : Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	Melakukan koordinasi percepatan pelaksanaan SPSK yang berada pada Satker yang menjadi Target di Tahun 2024	Penyelesaian evaluasi kinerja BMN secara efektif dan efisien	TW I : Koordinasi Penyampaian Target TW II : Monitoring Capaian s.d. TW II TW III: Monitoring Capaian s.d. TW III TW IV : Monitoring Capaian s.d. TW IV	TW I : Surat ke Satker TW II : Laporan Capaian TW II ke Seksi KI TW III : Laporan Capaian TW III ke Seksi KI TW IV : Laporan Capaian TW IV ke Seksi KI	Q1 s.d Q4 Tahun 2022	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp108.000.000

4	<p>SS : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif</p> <p>IKI : Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)</p>	Melakukan focus pengambilan data dan dokumen BMN pada satu Satuan Kerja sesuai jumlah target	<p>Penyelesaian evaluasi kinerja BMN secara efektif dan efisien</p>	<p>TW I : Koordinasi Penyampaian Target</p> <p>TW II : Monitoring Capaian s.d. TW II</p> <p>TW III: Monitoring Capaian s.d. TW III</p> <p>TW IV : Monitoring Capaian s.d. TW IV</p>	<p>TW I : Surat ke Satker</p> <p>TW II : Laporan Capaian TW II ke Seksi KI</p> <p>TW III : Laporan Capaian TWIII ke Seksi KI</p> <p>TW IV : Laporan Capaian TWIV ke Seksi KI</p>	Q1 s.d Q4 Tahun 2024	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp30.114.000
---	--	--	---	---	--	----------------------	-----------------------------------	--------------

Ambon, 12 Maret 2024
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Ambon



Ditandatangani secara elektronik
Catur Setiono
NIP 198208312004121001



**SASARAN KINERJA PEGAWAI PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 4 Maret s.d. 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO		PEGAWAI YANG DINILAI		NO		PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Catur Setiono		1	NAMA	Wibawa Pram Sihombing	
2	NIP	1982083 1200412 1 001		2	NIP	19760906 199903 1 001	
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Tk. I / III d		3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
4	JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon		4	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	
5	UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon		5	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	
HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	
A. UTAMA							
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan		Tingkat kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan		100%	<i>Penerima Layanan</i>	
			Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		100%	<i>Penerima Layanan</i>	
			Indeks Integritas		89,17	<i>Penerima Layanan</i>	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		71.5%	<i>Penerima Layanan</i>	
			Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN		86.5%	<i>Penerima Layanan</i>	
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang		Persentase Realisasi Pokok Lelang		100%	<i>Penerima Layanan</i>	

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Optimal	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%	<i>Penerima Layanan</i>
4	Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	<i>Penerima Layanan</i>
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negarayang Efektif	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	<i>Proses Bisnis</i>
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	<i>Proses Bisnis</i>
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	86%	<i>Proses Bisnis</i>
		Persentase Produktivitas Lelang	89%	<i>Proses Bisnis</i>
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	<i>Proses Bisnis</i>
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	<i>Penguatan Internal atau anggaran</i>
		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	<i>Penguatan Internal atau anggaran</i>
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	<i>Penguatan Internal atau anggaran</i>
		Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	<i>Penguatan Internal atau anggaran</i>
10	Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	<i>Penguatan Internal atau anggaran</i>
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah	Indeks Efektivitas UKI	82	<i>Penguatan Internal atau anggaran</i>
		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	<i>Penguatan Internal atau anggaran</i>
B. TAMBAHAN				

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PERILAKU KERJA*				
1	Berorientasi pelayanan			
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
2	Akuntabel			
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
3	Kompeten			
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
4	Harmonis			
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
5	Loyal			
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
6	Adaptif			
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan 		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	

PERILAKU KERJA*		
	- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai,

Ambon, 12 Maret 2024
Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani secara elektronik
Catur Setiono
NIP 198208312004121000



Ditandatangani secara elektronik
Wibawa Pram Sihombing
NIP197609061999031001

** Pimpinan dapat memberikan Ekspektasi khusus terhadap satu atau lebih aspek perilaku kerja Pegawai.*



**LAMPIRAN SASARAN KINERJA
PEGAWAI**

**KEMENTERIAN
KEUANGAN**

PERIODE PENILAIAN:

**4 Maret s.d. 31 DESEMBER TAHUN
2024**

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 23 pegawai
2. *Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Tingkat kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
4	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMNdengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71.5%	71.5%
5	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	45%	45%	-	45%	86.5%	86.5%
6	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
9	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%

--	--

KONSEKUENSI

1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Catur Setiono
198208312004121001

Jakarta, 12 Maret 2024
Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani secara elektronik
Wibawa Pram Sihombing
197609061999031001





No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
11	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	93%	93%	90%	90%	86%	86%
12	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
13	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
14	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	90%	90%
15	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
16	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
19	Indeks Efektivitas (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
20	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100